

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba telah banyak diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Meiranto (2013) meneliti apakah Proksi ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *corporate governance* di atas berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan manajemen laba. Besar kecilnya dewan komisaris tidak menentukan adanya tindakan manajemen laba di perusahaan. Sedangkan ukuran komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba karena semakin besar ukuran komite audit maka perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), menjelaskan tentang apakah mekanisme *good corporate governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan

manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara persial hanya dewan komisaris independen yang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal tersebut disebabkan karena dengan semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan komite audit dalam pelaksanaannya kurang efektif dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba disebabkan sampel yang digunakan memiliki jumlah kepemilikan manajerial yang sangat rendah.

Anggana dan Prastiwi (2013), meneliti tentang apakah *corporate governance* dengan mekanisme komisaris independen, komite audit, kualitas auditor eksternal dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba karena komisaris independen akan bertindak secara objektif demi kepentingan dan kebaikan perusahaan sehingga perusahaan dengan tingkat jumlah komisaris independen yang lebih besar akan dapat meminimalisir terjadinya manajemen

laba. Kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba karena kewajaran akan laporan keuangan auditan akan berpengaruh pada tingkat investasi dan kepercayaan investor terhadap manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Komite audit yang tidak signifikan berpengaruh ini menunjukkan bahwa fungsi komite audit dalam perusahaan sudah cukup luas dalam melakukan monitoring terhadap pelaporan dan penyusunan laporan keuangan.

Hidayanti dan Paramita (2014), meneliti tentang apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba riil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil karena ketidak mampuan institusional untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba riil, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba riil karena semakin besar struktur kepemilikan manajerial tidak merubah sikap dan oportunistik pihak manajemen dalam menjalankan praktik manajemen laba riil perusahaan.

Kusumaningtyas dan Farida (2015), meneliti tentang apakah kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh

kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena anggota yang memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya manipulasi laba yang dapat menguntungkan manajemen saja. Aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena semakin tinggi frekuensi rapat yang diadakan akan meningkatkan keefektivan komite audit dalam mengawasi manajemen. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba disebabkan bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari pada investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba

Guna dan Herawaty (2010), meneliti tentang apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, leverage, profitabilitas dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan independensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba, sedangkan leverage, profitabilitas dan kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) terletak pada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen.

2.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *earning management*. Menurut Jensen and Meckling (1976), hubungan keagenan muncul ketika satu orang lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, sehingga atas tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Pada *agency theory* yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Pemilik mengharapkan return yang tinggi dari investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan. Sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi dan dipenuhinya kebutuhan psikologis mereka. Hal ini menyebabkan timbul konflik antara manajemen dengan pemilik karena masing-masing akan memenuhi kepentingannya sendiri (*opportunistic behavioral*). Pemilik akan mengeluarkan biaya monitoring untuk mengawasi kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha meminimalkan biaya keagenan (*agency cost*) dengan sukarela memberi informasi keuangan kepada pemilik. Manajemen memberikan laporan keuangan secara teratur dengan harapan dapat mengurangi biaya monitoring. Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu terobsesi dengan kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Oleh karena itu, teori keagenan berkaitan dengan usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan keagenan.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.3 *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2003) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.

2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Tujuan corporate governance dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah :

1. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan kompetitif baik domestik maupun internasional, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat untuk mendukung investasi.
2. Untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan, dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi, dan RUPS.
3. Untuk mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi untuk membuat keputusan dan untuk bertindak dengan rasa moralitas yang ketat, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap berbagai stakeholder dan perlindungan lingkungan.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Kewajaran (*Fairness*). Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.
2. Transparansi (*Transparency*). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
3. Akuntabilitas (*Accountability*). Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

Penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat yaitu sebagai berikut (FCGI, 2001).

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *shareholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's values* dan dividen.

2.4 Mekanisme Corporate Governance

A. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi

manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atas *stakeholder*.

Pemegang saham institusional cenderung lebih banyak mempunyai informasi dari pada pemegang saham individu. Pada umumnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.

Cornett *et al.* (2006), menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

B. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

C. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil

keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris Utama adalah setara.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006: 13), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Jumlah dari dewan komisaris dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan.

2.5 Komite Audit

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*). Bahkan untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dan dengan pengetahuan serta pengalaman berkaitan dengan perusahaan dan keuangannya, diharapkan dapat mengurangi praktek manajemen laba dalam perusahaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan (*corporate governance*), Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan yang tercatat memiliki komite audit, melalui Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No: SE-008/BEI/12/2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Peraturan BAPEPAM –LK menyatakan bahwa komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Terdiri dari ketua komite audit dan anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.6 Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada pihak eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak memcerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Permasalahann manajemen laba merupakan masalah keagenan

yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan (Syaiful Iqbal, 2007).

Stice *et al.* (2007: 421) menjelaskan pendorong para manajer untuk melakukan manajemen laba yaitu:

1. Memenuhi target internal perusahaan.
2. Memenuhi harapan eksternal.
3. Meratakan atau memuluskan laba (*income smoothing*).
4. Mempercantik laporan keuangan (*window dressing*) untuk keperluan penjualan saham perdana (*initial public offering-IPO*) atau untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Pola manajemen laba menurut Scoot (2000) dalam Rahmawati (2000) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*, terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebaskan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.
2. *Income Minimization*, dilakukan pada saat perusahaan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*, dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.
4. *Income Smoothing*, dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

Teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berikut ini (Setiawati dan Na'im, 2000).

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, dalam hal ini manajemen mempengaruhi laba melalui pertimbangan (*judgment*) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini perubahan metode akuntansi digunakan untuk mencatat suatu transaksi, misalnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan atau manipulasi keputusan operasional. Sebagai contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat

atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, dan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.7 Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Menurut Roychowdhury (2006), manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil merupakan suatu tindakan manajemen yang menyimpang praktik bisnis perusahaan secara normal dengan tujuan utama untuk mencapai target laba yang diharapkan. Akan tetapi, target laba terpenuhi tidak selalu memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan meskipun target telah tercapai. Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas sehari-hari perusahaan selama periode berjalan. Sedangkan manajemen laba melalui manipulasi akrual dapat dilakukan selama periode akuntansi berjalan perusahaan.

Menurut Roychowdhury (2006) dalam Pratiwi dan Meiranto (2013), manajemen laba melalui aktivitas riil dilakukan melalui tiga cara yaitu arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya-biaya diskresioner.

1. Arus Kas Operasi

Arus kas operasi merupakan salah satu jenis aktivitas dari laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan. Metode yang digunakan untuk melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas operasi adalah manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan berkaitan mengenai manajer yang mencoba menaikkan penjualan selama periode

akuntansi dengan tujuan meningkatkan laba untuk memenuhi target laba yang diharapkan. Tindakan oportunistik manajer melalui manipulasi penjualan ini dapat dilakukan dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang sangat lunak. Strategi ini tentu dapat meningkatkan volume penjualan dan laba. Volume penjualan yang meningkat menyebabkan laba tahun berjalan tinggi namun arus kas menurun karena arus kas masuk kecil akibat penjualan kredit dan potongan harga. Oleh karena itu, aktivitas manipulasi penjualan menyebabkan arus kas kegiatan operasi periode sekarang menurun dibandingkan level penjualan normal dan pertumbuhan abnormal dari piutang.

2. Biaya Diskresioner

Biaya diskresi yang dapat dikurangi meliputi biaya iklan, biaya riset dan pengembangan serta biaya penjualan umum dan administrasi. Perusahaan dapat menurunkan atau mengurangi biaya diskresioner yang pada akhirnya akan meningkatkan laba periode berjalan dan dapat juga meningkatkan arus kas periode sekarang jika perusahaan secara umum membayar biaya seperti itu secara tunai. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan risiko menurunkan arus kas periode mendatang.

3. Biaya Produksi

Biaya produksi merupakan segala biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk menghasilkan suatu barang. Metode yang digunakan dalam melakukan manipulasi riil melalui biaya produksi ini adalah produksi berlebih (*overproduction*). *Overproduction* yaitu memproduksi barang lebih besar daripada yang dibutuhkan dengan tujuan mencapai permintaan yang diharapkan sehingga laba dapat meningkat. Produksi dalam skala besar menyebabkan biaya *overhead* tetap dibagi dengan jumlah unit barang yang besar sehingga rata-rata biaya per unit dan harga pokok penjualan menurun. Penurunan harga pokok penjualan ini akan berdampak pada peningkatan margin operasi.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi. Pemilik institusional merupakan pemilik yang dianggap cenderung lebih hati-hati dan teliti dalam menggunakan informasi keuangan. Selain itu, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil

oleh manajer. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusional akan meminimalisir tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Ada tidaknya kepemilikan saham oleh manajemen akan mempengaruhi motivasi manajemen dalam setiap tindakan manajer. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga konflik kepentingan dapat dikurangi. Selain itu, semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen dapat mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Dari penjelasan di atas maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

2.8.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Dewan komisaris merupakan pihak yang menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan megawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta menjamin terlaksananya akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan dewan komisaris independen karena dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu sehingga status independen dewan komisaris dapat mengurangi praktik kecurangan yang dapat merugikan para pemegang saham atau pihak lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meminimaisir tindakan manajemen untuk manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H3 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

2.8.4 Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena merupakan salah satu sistem pengendalian dalam perusahaan yang menghubungkan antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen.

Komite audit, sebagai jembatan antara perusahaan dengan auditor eksternal akan memeriksa laporan keuangan perusahaan beserta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku sebelum diverifikasi oleh auditor eksternal. Semakin besar komposisi komite audit maka pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan internal perusahaan dan laporan keuangan auditan akan lebih maksimal sehingga kemungkinan *asymmetric information* baik itu berupa *moral hazard* maupun *adverse selection* antara manajer dan pemegang saham akan dapat diminimalisir dan praktik manajemen laba dapat dihindari.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

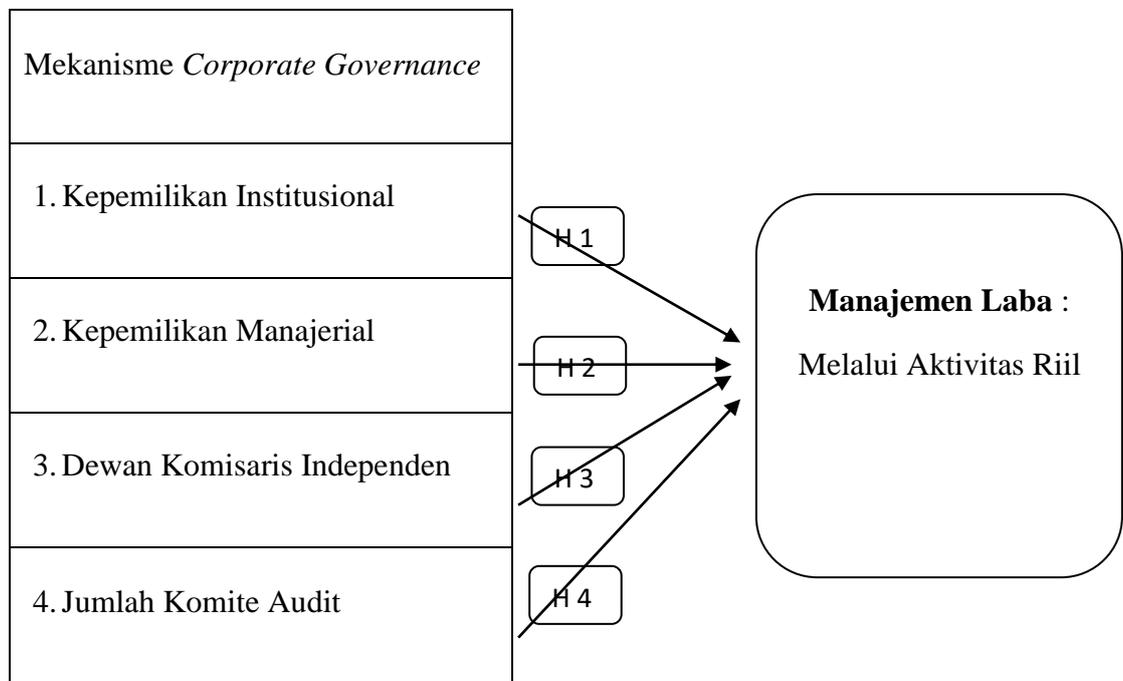
H4 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

2.9 Kerangka Konseptual

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap *earnings* yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Salah satu mekanisme

yang dapat digunakan adalah penerapan *good corporate governance*. Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dalam hal ini kepemilikan manajerial (H1), kepemilikan institusional (H2), komposisi dewan komisaris (H3), dan Jumlah komite audit (H4) (variabel independen) terhadap manajemen laba melalui *real activities manipulation* (variabel dependen) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran